EVALUASI PELAKSANAAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT

Reystha Zalsabhil'lah Ananda Warwey
NPP. 33.1212
Program Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Email: abelwarwey2003@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Zulkham Sadat Zuwanda, S.H., MH
Email: sadat@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *The results of the research show that the implementation of birth certificate registration has been running, but has not been optimal. In terms of effectiveness, services have been implemented and have improved through the pick-up and drop-off program, however the target of birth certificate ownership has not been fully achieved. In terms of efficiency, resource utilization has been carried out, but is still constrained by budget, facilities and limited field services. In terms of equity, services are not yet completely equal due to differences in access between urban and rural areas. In terms of responsiveness, the officers were considered quite helpful, but the public still faced problems with information and speed of service.* ***Purpose:*** *This research aims to analyze the implementation of birth certificate registration in Pariwari District and Furwagi District, Fakfak Regency, West Papua Province, identify obstacles, and formulate strategies to improve service quality.* ***Method:*** *The research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The analysis was carried out using William N. Dunn's evaluation theory which includes effectiveness, efficiency, equity and responsiveness.* ***Result:*** *The results of the research show that the implementation of birth certificate registration has been running, but has not been optimal. In terms of effectiveness, services have been implemented and have improved through the pick-up and drop-off program, however the target of birth certificate ownership has not been fully achieved. In terms of efficiency, resource utilization has been carried out, but is still constrained by budget, facilities and limited field services. In terms of equity, services are not yet completely equal due to differences in access between urban and rural areas. In terms of responsiveness, the officers were considered quite helpful, but the public still faced problems with information and speed of service.* ***Conclusion:*** *The strategies needed include increasing socialization, expanding pick-up and drop-off, strengthening operational support, and improving the service system according to regional characteristics.*
Keywords: *birth certificate registration, public services, policy evaluation, population administration, Fakfak Regency*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan akta kelahiran telah berjalan, tetapi belum maksimal. Dari sisi efektivitas, pelayanan sudah terlaksana dan mengalami peningkatan melalui program jemput bola, namun target kepemilikan akta kelahiran belum tercapai sepenuhnya. Dari sisi efisiensi, pemanfaatan sumber daya telah dilakukan, tetapi masih terkendala anggaran, sarana, dan keterbatasan pelayanan lapangan. Dari

sisi pemerataan, pelayanan belum sepenuhnya merata karena adanya perbedaan akses antara wilayah perkotaan dan perkampungan. Dari sisi responsivitas, petugas dinilai cukup membantu, namun masyarakat masih menghadapi kendala informasi dan kecepatan pelayanan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di Distrik Pariwari dan Distrik Furwagi Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, mengidentifikasi kendalanya, serta merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan. **Metode:** Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori evaluasi William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan responsivitas. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan akta kelahiran telah berjalan, tetapi belum maksimal. Dari sisi efektivitas, pelayanan sudah terlaksana dan mengalami peningkatan melalui program jemput bola, namun target kepemilikan akta kelahiran belum tercapai sepenuhnya. Dari sisi efisiensi, pemanfaatan sumber daya telah dilakukan, tetapi masih terkendala anggaran, sarana, dan keterbatasan pelayanan lapangan. Dari sisi pemerataan, pelayanan belum sepenuhnya merata karena adanya perbedaan akses antara wilayah perkotaan dan perkampungan. Dari sisi responsivitas, petugas dinilai cukup membantu, namun masyarakat masih menghadapi kendala informasi dan kecepatan pelayanan. **Kesimpulan:** Strategi yang diperlukan meliputi peningkatan sosialisasi, perluasan jemput bola, penguatan dukungan operasional, serta perbaikan sistem pelayanan sesuai karakteristik wilayah.
Kata kunci: pencatatan akta kelahiran, pelayanan publik, evaluasi kebijakan, administrasi kependudukan, Kabupaten Fakfak

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis, menjamin hak yang sama bagi setiap individu, serta menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik karena kesejahteraan rakyat merupakan salah satu indikator keberhasilan negara. Menurut Saputra dan Risnawati (2022), kualitas pelayanan administrasi kependudukan menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta tanggung jawab penyelenggara layanan. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang sederhana, cepat, pasti, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Penyelenggara wajib menyediakan standar pelayanan yang jelas, termasuk persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya, dan mekanisme pengaduan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kualitas pelayanan. Dengan demikian, pelayanan publik yang berkualitas menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Menurut Maulidah (2014), pelayanan publik merupakan hasil kegiatan birokrasi yang secara langsung dirasakan masyarakat dan menjadi bagian dari tugas utama pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pemerintah juga harus terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan publik (Maulidah, 2014). Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan pokok pemerintah yang harus dilaksanakan dengan baik untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan kepada masyarakat (Zulfikar, Rozaili, & Hansyar, 2022). Ripa'i (2019) menjelaskan bahwa administrasi kependudukan

merupakan sistem yang mengatur pencatatan peristiwa penting penduduk sebagai dasar penyediaan data kependudukan yang akurat dan berkelanjutan. Selain itu, Ismail dan Moersito (2021) menegaskan bahwa sistem informasi administrasi kependudukan berperan penting dalam menghasilkan data yang valid sebagai dasar perumusan kebijakan publik.

Pendaftaran kelahiran merupakan salah satu aspek esensial dalam administrasi kependudukan yang bertujuan membentuk identitas hukum setiap individu. Akta kelahiran menjadi hak pertama yang diperoleh seseorang sejak lahir. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa setiap peristiwa penting, termasuk kelahiran, wajib dilaporkan kepada instansi terkait untuk memperoleh pengakuan hukum dari negara. Permendagri Nomor 9 Tahun 2019 diterbitkan untuk mempercepat peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran melalui pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah didorong melakukan inovasi seperti pelayanan keliling, kerja sama dengan fasilitas kesehatan dan lembaga pendidikan, serta integrasi layanan dengan instansi lain. Aturan ini juga menegaskan bahwa penerbitan akta kelahiran tidak dipungut biaya karena akta kelahiran merupakan hak dasar setiap anak.

Dalam perspektif internasional, sistem pencatatan sipil dan statistik hayati (Civil Registration and Vital Statistics/CRVS) dipandang sebagai fondasi penting bagi perlindungan hak sipil, perencanaan pembangunan, dan akuntabilitas pemerintah (AbouZahr et al., 2015). Mikkelsen et al. (2015) juga menegaskan bahwa kualitas sistem pencatatan sipil menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas data kependudukan suatu negara. Selain itu, Phillips et al. (2015) menemukan bahwa negara dengan sistem CRVS yang berfungsi baik cenderung memiliki hasil pembangunan kesehatan yang lebih baik. Oleh karena itu, kepemilikan akta kelahiran tidak hanya berkaitan dengan identitas hukum individu, tetapi juga mendukung pembangunan nasional secara luas. Cobos Muñoz, Abouzahr, dan de Savigny (2018) melalui kerangka Ten CRVS Milestones menjelaskan bahwa pencatatan kelahiran merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam membangun sistem administrasi kependudukan yang efektif. Sementara itu, Musadad et al. (2023) menunjukkan bahwa penguatan sistem CRVS di Indonesia memerlukan kolaborasi lintas sektor, inovasi pelayanan, serta pendekatan yang sesuai dengan kondisi geografis daerah untuk meningkatkan cakupan pencatatan peristiwa vital masyarakat.

Di Provinsi Papua Barat, kepemilikan akta kelahiran masih berada di bawah target nasional. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran meningkat dari 74,74% pada tahun 2021 menjadi 77,76% pada tahun 2022, namun masih jauh dari target nasional sebesar 97%. Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0–18 tahun belum optimal, padahal akta kelahiran merupakan identitas hukum penting untuk memperoleh berbagai pelayanan publik. Kabupaten Fakfak menghadapi tantangan dalam pencatatan akta kelahiran akibat perbedaan kondisi geografis, keterbatasan akses pelayanan, dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran. Dari 94.895 anak yang wajib memiliki akta kelahiran, sebanyak 56.886 anak telah memiliki akta kelahiran dan 38.009 anak belum memiliki akta kelahiran, sehingga cakupan kepemilikan baru mencapai 59,95%. Di Distrik Pariwari, persentase kepemilikan akta kelahiran sebesar 58,82%, sedangkan di Distrik Furwagi mencapai 65,84%. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan akta kelahiran tidak selalu lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan.

Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Fakfak perlu dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan, menilai efektivitas program pemerintah, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan. Upaya tersebut penting untuk memastikan setiap anak memperoleh hak identitas hukum secara setara, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Temuan ini juga sejalan

dengan Musadad et al. (2023) yang menekankan pentingnya inovasi pelayanan, penguatan sistem administrasi kependudukan, dan perluasan akses layanan guna meningkatkan cakupan pencatatan kelahiran di daerah dengan karakteristik geografis yang menantang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan masih rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Fakfak, khususnya di Distrik Pariwari dan Distrik Furwagi. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran serta program pelayanan jemput bola, kenyataannya persentase kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Fakfak baru mencapai 59,95%, sehingga masih terdapat lebih dari 40% anak yang belum memiliki identitas hukum resmi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target kebijakan pemerintah dengan realitas pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di lapangan. Selain itu, terdapat fenomena menarik bahwa Distrik Furwagi sebagai wilayah perkampungan justru memiliki persentase kepemilikan akta kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan Distrik Pariwari yang merupakan wilayah perkotaan. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa akses wilayah bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi kepemilikan akta kelahiran dan memerlukan kajian evaluatif yang lebih mendalam.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada efektivitas inovasi pelayanan akta kelahiran, pelayanan berbasis online, implementasi hak kependudukan kelompok tertentu, atau pelayanan akta kelahiran pada masyarakat adat di daerah terpencil. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengevaluasi pelaksanaan pencatatan akta kelahiran menggunakan perspektif evaluasi kebijakan yang mencakup aspek efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan responsivitas pada wilayah dengan karakteristik geografis yang berbeda dalam satu daerah, yaitu wilayah perkotaan dan perkampungan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di Distrik Pariwari dan Distrik Furwagi Kabupaten Fakfak menggunakan teori evaluasi William N. Dunn. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelayanan akta kelahiran serta merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Fakfak.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting mengingat masih rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Fakfak yang baru mencapai sekitar 59,95%, sehingga masih terdapat lebih dari 40% anak yang belum memiliki identitas hukum resmi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, baik di wilayah perkotaan maupun perkampungan, yang dipengaruhi oleh faktor akses pelayanan, keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi geografis, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akta kelahiran. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, maka akan semakin banyak anak yang berpotensi mengalami hambatan dalam memperoleh hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan akses terhadap berbagai program pemerintah. Selain itu, penelitian ini diperlukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pelaksanaan pencatatan akta kelahiran serta menghasilkan rekomendasi perbaikan yang dapat menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak dalam meningkatkan kualitas, pemerataan, dan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan secara berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pencatatan dan penerbitan akta kelahiran. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi, perbandingan, serta landasan dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Amalia (2020) dengan judul Efektivitas Inovasi "One Day Service" dalam Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi One Day Service telah berjalan sesuai standar operasional prosedur dan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan penerbitan akta kelahiran. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sarana prasarana, jaringan internet, kompetensi sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ismail (2022) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan dipengaruhi oleh aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sehingga kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengelola faktor-faktor tersebut. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian mengenai pelayanan akta kelahiran dan penggunaan metode deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian.

Penelitian kedua dilakukan oleh Isma Nirmala (2022) dengan judul Inovasi Pelayanan Online Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan akta kelahiran secara daring mampu mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi, kurangnya sosialisasi menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami penggunaan layanan tersebut. Kondisi tersebut memperkuat hasil penelitian Batubara (2022) yang menemukan bahwa peningkatan tertib administrasi kependudukan sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta intensitas sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas pelayanan akta kelahiran, namun berbeda pada fokus penelitian yang menitikberatkan pada inovasi pelayanan berbasis digital.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Piet Hein Pusung (2024) dengan judul Implementasi Pemenuhan Hak Kependudukan Bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak kependudukan bagi Suku Anak Dalam telah dilakukan, namun belum berjalan optimal. Penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan yang lebih adaptif dan pemberdayaan masyarakat dalam proses penerbitan dokumen kependudukan. Temuan tersebut juga relevan dengan penelitian Ismail (2022) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan administrasi kependudukan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai serta koordinasi antarinstansi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada kajian administrasi kependudukan dan hak masyarakat memperoleh dokumen kependudukan, sedangkan perbedaannya terletak pada sasaran penelitian dan jenis dokumen yang dikaji.

Penelitian keempat dilakukan oleh Lidya Euanjelia Wambrauw (2025) dengan judul Pelayanan Akta Kelahiran bagi Penduduk Suku Umari oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan akta kelahiran bagi masyarakat Suku Umari masih menghadapi berbagai kendala, seperti kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran. Program jemput bola yang dilakukan Disdukcapil telah membantu meningkatkan pelayanan, namun belum sepenuhnya efektif. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Batubara (2022) yang menunjukkan bahwa peningkatan tertib administrasi kependudukan memerlukan strategi pelayanan yang lebih proaktif dan menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan publik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai pelayanan akta kelahiran di wilayah Papua yang memiliki tantangan geografis, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan karakteristik masyarakat yang diteliti.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada efektivitas inovasi pelayanan akta kelahiran seperti penelitian Amalia (2020), inovasi pelayanan online seperti penelitian Isma Nirmala (2022), maupun pelayanan akta kelahiran pada kelompok masyarakat tertentu seperti Suku Anak Dalam dan Suku Umari yang diteliti oleh Piet Hein Pusung (2024) dan Lidya Euanjelia Wambrauw (2025). Penelitian ini menawarkan kebaruan dari aspek objek, lokasi, dan pendekatan analisis, yaitu dengan mengevaluasi pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di dua wilayah yang memiliki karakteristik geografis berbeda, yakni Distrik Pariwari (perkotaan) dan Distrik Furwagi (perkampungan) di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup dimensi efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan responsivitas. Selain itu, penelitian ini mengungkap fenomena yang unik bahwa tingkat kepemilikan akta kelahiran di wilayah perkampungan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan, sehingga menghasilkan analisis baru mengenai pengaruh karakteristik wilayah terhadap keberhasilan pelayanan administrasi kependudukan serta merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat Kabupaten Fakfak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah baru dalam kajian evaluasi pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pencatatan akta kelahiran di daerah terpencil dan wilayah kepulauan di Papua Barat.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di Distrik Pariwari dan Distrik Furwagi, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dengan menganalisis efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan responsivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi masyarakat maupun penyelenggara pelayanan dalam proses pencatatan akta kelahiran, serta merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sehingga cakupan kepemilikan akta kelahiran dapat meningkat secara merata di wilayah perkotaan maupun perkampungan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam mengenai pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Fakfak, khususnya di

Distrik Pariwari dan Distrik Furwagi. Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena pelayanan administrasi kependudukan secara alamiah berdasarkan pengalaman dan pandangan para pelaku yang terlibat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan memanfaatkan teknik triangulasi untuk meningkatkan keabsahan data. Informan penelitian dipilih secara purposive, terdiri atas pejabat dan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, aparat distrik, serta masyarakat yang mengurus akta kelahiran. Informan kunci adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak karena memiliki kewenangan, pengetahuan, dan tanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan pelayanan pencatatan akta kelahiran. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003) yang meliputi efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan responsivitas sebagai fokus analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi temuan. Penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak serta Distrik Pariwari dan Distrik Furwagi, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dengan waktu penelitian mengikuti jadwal penelitian dan penyusunan skripsi Tahun Akademik 2025–2026. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada adanya perbedaan karakteristik wilayah perkotaan dan perkampungan yang relevan untuk mengevaluasi pelaksanaan pencatatan akta kelahiran secara lebih komprehensif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran di Distrik Pariwari dan Distrik Furwagi Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat

Gambar 1.
Visualisasi Teori Menggunakan Nvivo

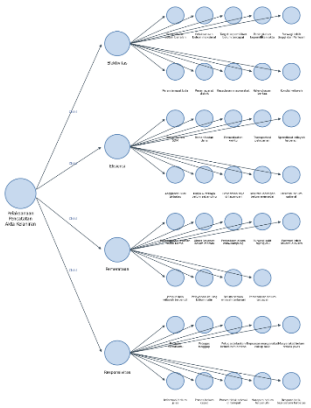

Berdasarkan Gambar 1. analisis pelaksanaan pencatatan akta kelahiran menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi dimensi efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan responsivitas. Hasil visualisasi NVivo menempatkan pelaksanaan pencatatan akta kelahiran sebagai node induk yang bercabang ke empat child node utama tersebut. Visualisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan dinilai tidak hanya dari keberhasilan program, tetapi juga dari penggunaan sumber daya, pemerataan jangkauan layanan, dan tanggapan penyelenggara terhadap kebutuhan

masyarakat. Pelaksanaan pencatatan akta kelahiran merupakan bagian penting dalam administrasi kependudukan karena akta kelahiran merupakan bentuk pengakuan hukum negara terhadap identitas seseorang sejak lahir. Keberhasilan pelaksanaannya dapat dilihat dari kemampuan layanan menjangkau masyarakat, mempermudah proses pengurusan, meningkatkan angka kepemilikan akta kelahiran, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Di Kabupaten Fakfak, pelaksanaan pencatatan akta kelahiran menghadapi tantangan karena perbedaan karakteristik wilayah antara Distrik Pariwari sebagai wilayah yang relatif dekat dengan pusat pelayanan dan Distrik Furwagi yang memiliki akses wilayah lebih sulit. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik wilayah tersebut tidak selalu menghasilkan capaian pelayanan yang sama. Data penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Fakfak masih belum optimal, yaitu 59,95%. Distrik Pariwari memiliki persentase kepemilikan akta kelahiran sebesar 58,82%, sedangkan Distrik Furwagi mencapai 65,84%. Data ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan akta kelahiran masih menghadapi berbagai tantangan, baik di wilayah perkotaan maupun perkampungan. Capaian Furwagi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kedekatan lokasi dengan kantor pelayanan, tetapi juga dipengaruhi oleh pendekatan pelayanan, partisipasi aparat wilayah, serta respons masyarakat terhadap pelayanan. Dengan demikian, pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di Distrik Pariwari dan Distrik Furwagi dianalisis berdasarkan dimensi efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan responsivitas.

3.1.1 Efektivitas

Dimensi efektivitas digunakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pencatatan akta kelahiran berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akta kelahiran, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sasaran.

Gambar 2.

Word Chart NVivo Dimensi Efektivitas



Berdasarkan Gambar Word Chart NVivo, kata-kata yang paling dominan muncul adalah jemput bola, peningkatan, target, maksimal, akses, kesadaran, dan capaian. Dominasi kata-kata tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pencatatan akta kelahiran sangat berkaitan dengan keberhasilan program jemput bola, peningkatan kepemilikan akta kelahiran, dan pencapaian target pelayanan yang masih belum maksimal. Selain itu, akses dan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pelayanan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di Distrik Pariwari dan Distrik Furwagi sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Kepala Dinas menyampaikan bahwa pelaksanaan pelayanan telah berjalan, namun capaian di Distrik Furwagi justru lebih tinggi dibandingkan Distrik Pariwari karena adanya pelayanan jemput bola dan peran aparat distrik, terutama di wilayah terpencil.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan tidak selalu ditentukan oleh kedekatan geografis dengan pusat pelayanan. Keberhasilan yang relatif lebih baik di Furwagi dipengaruhi oleh pendekatan pelayanan yang aktif dan langsung menjangkau masyarakat. Sekretaris Dinas juga menyatakan bahwa pelayanan sudah berjalan tetapi belum maksimal dan belum merata. Hal ini

menunjukkan bahwa program pelayanan telah tersedia, namun hasil pelayanan belum tercapai secara menyeluruh. Efektivitas juga terlihat dari capaian target kepemilikan akta kelahiran yang belum tercapai secara keseluruhan. Meskipun terjadi peningkatan setiap tahun, masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran. Faktor penyebabnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan kendala akses di beberapa wilayah.

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa target belum tercapai walaupun telah dilakukan berbagai upaya, termasuk pelayanan jemput bola. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sarana dan kondisi wilayah yang memengaruhi capaian pelayanan. Program jemput bola memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepemilikan akta kelahiran. Program ini memudahkan masyarakat yang mengalami keterbatasan akses untuk memperoleh pelayanan administrasi kependudukan. Namun, peningkatan tersebut belum optimal karena cakupan jemput bola masih terbatas dan baru menjangkau beberapa sekolah.

Kepala Distrik Furwagi menyampaikan bahwa kepemilikan akta kelahiran meningkat sejak adanya program jemput bola, tetapi belum semua masyarakat dapat dijangkau karena jarak wilayah yang jauh dan akses yang masih terbatas. Di sisi lain, Kepala Distrik Pariwari menyatakan bahwa peningkatan kepemilikan akta kelahiran di wilayahnya belum signifikan meskipun akses pelayanan relatif lebih mudah. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelayanan. Faktor utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pencatatan akta kelahiran meliputi:

a. Kemudahan akses pelayanan.
b. Pelaksanaan program jemput bola, terutama di distrik terpencil.
c. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akta kelahiran.

Namun demikian, target kepemilikan akta kelahiran masih belum tercapai karena beberapa faktor:

1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat
   Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya akta kelahiran sebagai identitas hukum. Sebagian masyarakat menganggap akta kelahiran hanya diperlukan untuk keperluan tertentu, seperti masuk sekolah. Selain itu, sosialisasi belum berjalan secara konsisten dan merata.
2. Kendala Akses Pelayanan
   Kondisi geografis, jarak yang jauh, keterbatasan transportasi, dan kondisi wilayah menjadi hambatan bagi masyarakat untuk datang langsung ke kantor pelayanan.
3. Program Jemput Bola Belum Maksimal
   Program jemput bola telah membantu meningkatkan kepemilikan akta kelahiran, namun pelaksanaannya masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah. Keterbatasan sarana seperti komputer, printer, perangkat perekaman data, jaringan internet yang belum optimal, serta keterbatasan anggaran operasional menjadi faktor penghambat.

Berdasarkan dimensi efektivitas menurut William N. Dunn, pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di Distrik Pariwari dan Distrik Furwagi sudah berjalan tetapi belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari adanya pelaksanaan pelayanan, peningkatan kepemilikan akta kelahiran, dan penerapan strategi jemput bola. Namun, target kepemilikan akta kelahiran secara keseluruhan belum tercapai karena masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan jangkauan program jemput bola, dan kondisi geografis yang memengaruhi pelaksanaan pelayanan di lapangan.

3.1.2 Efisiensi

Dimensi efisiensi digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya manusia, dana, sarana, dan waktu digunakan secara optimal dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan akta kelahiran. Efisiensi

penting dianalisis karena keberhasilan pelayanan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari bagaimana hasil tersebut dicapai dengan penggunaan sumber daya yang tepat dan terukur.

Gambar 3.

Word Chart NVivo Dimensi Efisiensi

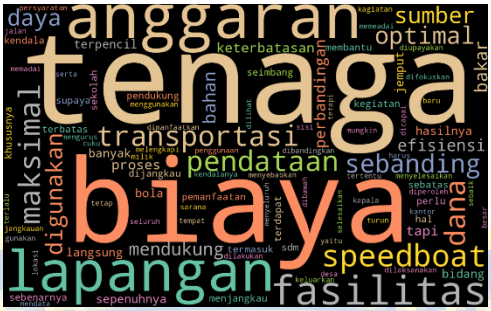

Berdasarkan Gambar Word Chart NVivo, kata yang paling dominan muncul adalah tenaga, biaya, lapangan, anggaran, fasilitas, transportasi, pendataan, dan speedboat. Dominasi kata-kata tersebut menunjukkan bahwa efisiensi pelaksanaan pencatatan akta kelahiran sangat berkaitan dengan penggunaan sumber daya, baik tenaga, biaya, maupun sarana pendukung pelayanan. Kata anggaran, fasilitas, dan speedboat menunjukkan pentingnya dukungan operasional dalam menjangkau wilayah terpencil, sedangkan kata pendataan dan lapangan menunjukkan bahwa pelayanan di beberapa wilayah masih banyak berhenti pada tahap pendataan awal dan belum dapat diselesaikan langsung di tempat. Dengan demikian, dimensi efisiensi berpusat pada pemanfaatan sumber daya secara optimal, namun masih dipengaruhi keterbatasan operasional.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan pencatatan akta kelahiran telah diupayakan sebaik mungkin, tetapi belum menghasilkan pelayanan yang maksimal. Kepala Dinas menyampaikan bahwa perbandingan antara hasil layanan dengan biaya dan tenaga yang digunakan belum sepenuhnya seimbang karena keterbatasan anggaran menyebabkan pelayanan jemput bola hanya difokuskan pada sekolah-sekolah tertentu di wilayah terpencil.

Sekretaris Dinas menjelaskan bahwa tenaga pelaksana dan fasilitas sudah cukup mendukung, termasuk penggunaan speedboat milik kantor untuk pelayanan di Distrik Furwagi. Namun, anggaran bahan bakar masih terbatas sehingga sarana yang tersedia belum dapat digunakan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga kemampuan mengoperasikan fasilitas tersebut secara berkelanjutan. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyampaikan bahwa tenaga dan biaya telah diupayakan secara optimal, namun hasil yang diperoleh belum sebanding karena masih terdapat kendala di lapangan, seperti keterbatasan jangkauan pelayanan dan masyarakat yang belum melengkapi persyaratan administrasi.

Petugas pelaksana juga menjelaskan bahwa dalam kegiatan jemput bola tidak semua fasilitas pendukung dapat dibawa ke distrik terpencil, khususnya Distrik Furwagi. Akibatnya, pelayanan di lapangan lebih banyak dilakukan pada tahap pendataan dan belum dapat menyelesaikan seluruh proses penerbitan akta kelahiran secara langsung. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan di wilayah terpencil memerlukan biaya, tenaga, dan waktu yang lebih besar dibandingkan wilayah yang dekat dengan pusat pelayanan. Petugas harus turun langsung ke lapangan, menggunakan transportasi khusus, menyesuaikan kondisi geografis, serta menghadapi masyarakat yang belum melengkapi persyaratan administrasi.

Meskipun demikian, instansi terus berupaya meningkatkan efisiensi melalui perbaikan sistem pelayanan agar lebih mudah dijangkau masyarakat serta memaksimalkan kegiatan pelayanan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di Distrik Pariwari dan Distrik Furwagi belum sepenuhnya efisien. Faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi meliputi:

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan kendaraan operasional, komputer, printer, dan jaringan internet menyebabkan pelayanan jemput bola tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Selain itu, proses penginputan data dan penerbitan dokumen menjadi lebih lambat.

2. Keterbatasan Anggaran Operasional
   Keterbatasan anggaran menyebabkan program jemput bola tidak dapat dilaksanakan secara intensif dan hanya menjangkau wilayah tertentu sehingga pelayanan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
   Jumlah petugas yang terbatas menyebabkan beban kerja tinggi dan pelayanan belum dapat dilakukan secara cepat dan merata. Selain itu, kemampuan teknis dalam penggunaan sistem administrasi berbasis digital masih perlu ditingkatkan.

Peningkatan kepemilikan akta kelahiran memang telah terjadi, tetapi peningkatan tersebut belum sebanding dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan dimensi efisiensi William N. Dunn, pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di Distrik Pariwari dan Distrik Furwagi belum sepenuhnya efisien. Penggunaan sumber daya yang terbatas belum mampu menghasilkan pelayanan yang optimal dan merata. Efisiensi masih terhambat oleh keterbatasan anggaran operasional, fasilitas lapangan, kondisi geografis, dan ketidaksiapan masyarakat dalam melengkapi persyaratan administrasi.

3.1.3 Pemerataan

Dimensi pemerataan digunakan untuk menilai apakah pelayanan pencatatan akta kelahiran telah dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perkampungan. Pemerataan menjadi penting karena pelayanan yang baik tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat secara setara.

Gambar 4.
Word Chart NVivo Dimensi Pemerataan

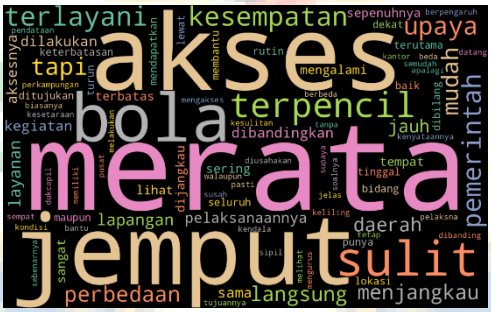

Berdasarkan Gambar Word Chart NVivo, kata yang paling dominan muncul adalah akses, merata, jemput bola, terpencil, sulit, kesempatan, dan terlayani. Dominasi kata-kata tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan sangat berkaitan dengan kesetaraan akses antara wilayah yang dekat dengan pusat pelayanan dan wilayah yang sulit dijangkau. Kata jemput bola dan terpencil menunjukkan upaya pemerintah menjangkau masyarakat di daerah perkampungan, sedangkan kata sulit, jauh, dan perbedaan menunjukkan masih adanya ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan wilayah terpencil. Dengan demikian, dimensi pemerataan berpusat pada aksesibilitas pelayanan, jangkauan wilayah, dan upaya pemerintah mengurangi kesenjangan pelayanan antarwilayah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal pelayanan pencatatan akta kelahiran ditujukan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan tempat tinggal. Kepala Dinas menyatakan bahwa semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan, tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya merata, terutama di wilayah seperti Distrik Furwagi yang memiliki akses lebih sulit dibandingkan Distrik Pariwari. Sekretaris Dinas juga menjelaskan bahwa kesempatan

pelayanan memang tersedia bagi semua masyarakat, tetapi kenyataannya masih terdapat perbedaan karena keterbatasan akses dan kondisi wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan tidak hanya dilihat dari ketersediaan layanan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk menjangkau dan memanfaatkan layanan tersebut.

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa pelayanan memang ditujukan untuk seluruh masyarakat, namun wilayah yang jauh seperti Furwagi masih mengalami kendala dalam menjangkau layanan dibandingkan wilayah Pariwari. Kepala Distrik Furwagi menyampaikan bahwa masyarakat di Furwagi tidak semudah masyarakat kota dalam mengurus akta kelahiran sehingga pelayanan belum dapat dikatakan merata. Hambatan geografis, jarak, dan keterbatasan frekuensi pelayanan menyebabkan masyarakat Furwagi belum memperoleh kemudahan akses yang sama.

Sementara itu, Kepala Distrik Pariwari juga mengakui bahwa meskipun akses di Pariwari lebih mudah, perbedaan pelayanan dengan Furwagi masih terlihat jelas sehingga pelayanan belum merata. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah daerah melaksanakan program jemput bola. Kepala Dinas menjelaskan bahwa pemerintah turun langsung ke lapangan agar masyarakat yang jauh dari kantor pelayanan tetap dapat memperoleh layanan, meskipun pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara rutin di seluruh wilayah.

Program jemput bola dinilai membantu masyarakat Distrik Furwagi, terutama yang sulit mengakses kota. Namun, karena pelaksanaannya belum sering dilakukan, belum seluruh masyarakat dapat terlayani secara optimal. Petugas pelaksana juga menyatakan bahwa tidak semua lokasi dapat dijangkau karena keterbatasan kapasitas pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di Distrik Pariwari dan Distrik Furwagi belum sepenuhnya merata. Faktor-faktor yang memengaruhi pemerataan antara lain:

1. Perbedaan Kondisi Geografis dan Aksesibilitas Wilayah
   Distrik Furwagi memiliki kondisi geografis yang lebih sulit dijangkau, jarak yang jauh, hanya dapat diakses melalui transportasi laut, serta memiliki keterbatasan transportasi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih sulit memperoleh pelayanan dibandingkan masyarakat di Distrik Pariwari.
2. Belum Meratanya Program Jemput Bola
   Program jemput bola telah dilaksanakan sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi pelaksanaannya masih terbatas karena keterbatasan sarana, anggaran, dan jangkauan pelayanan. Akibatnya, belum semua wilayah merasakan manfaat program tersebut.
3. Perbedaan Tingkat Kesadaran Masyarakat
   Kesadaran masyarakat dalam mengurus akta kelahiran masih berbeda-beda. Menariknya, Distrik Furwagi yang merupakan wilayah perkampungan justru memiliki capaian kepemilikan akta kelahiran lebih tinggi dibandingkan Distrik Pariwari karena adanya pendekatan pelayanan yang lebih aktif dari pemerintah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah yang lebih mudah diakses belum tentu memiliki capaian pelayanan yang lebih baik, sedangkan wilayah yang sulit dijangkau dapat memiliki capaian lebih tinggi karena adanya intervensi pelayanan yang lebih aktif. Berdasarkan dimensi pemerataan William N. Dunn, pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di Distrik Pariwari dan Distrik Furwagi belum sepenuhnya merata. Hal ini disebabkan oleh perbedaan akses wilayah, belum optimalnya jangkauan program jemput bola, serta perbedaan tingkat kesadaran masyarakat. Meskipun demikian, program jemput bola menunjukkan adanya upaya nyata pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan pelayanan sehingga pemerataan pelayanan mulai mengarah pada perbaikan, meskipun belum tercapai secara optimal.

3.1.4 Responsivitas

Dimensi responsivitas digunakan untuk melihat sejauh mana pelayanan mampu merespons kebutuhan, harapan, dan keluhan masyarakat. Responsivitas menjadi ukuran penting karena menunjukkan apakah penyelenggara pelayanan peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Pelayanan yang responsif tidak hanya tersedia, tetapi juga mampu memberikan penjelasan, bantuan, arahan, dan tindak lanjut sesuai kebutuhan masyarakat.

Gambar 5.

Word Chart NVivo Dimensi Responsivitas



Berdasarkan Gambar Word Chart NVivo, kata yang paling dominan muncul adalah cepat, puas, respon, informasi, keluhan, berkas, harapan, dan selesai. Dominasi kata-kata tersebut menunjukkan bahwa responsivitas pelaksanaan pencatatan akta kelahiran sangat berkaitan dengan cara petugas merespons kebutuhan masyarakat, memberikan informasi, menanggapi keluhan, serta membantu proses pengurusan dokumen. Kata cepat, puas, dan harapan menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh kecepatan pelayanan dan kesesuaian hasil pelayanan dengan harapan mereka. Sementara itu, kata informasi, berkas, dan selesai menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi kendala terkait kejelasan persyaratan, kelengkapan administrasi, dan belum selesainya pelayanan secara langsung di tempat. Dengan demikian, dimensi responsivitas berpusat pada kualitas tanggapan petugas terhadap masyarakat, namun masih dipengaruhi oleh keterbatasan proses pelayanan dan kejelasan informasi.

Berdasarkan hasil penelitian, responsivitas petugas dalam pelayanan pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Fakfak tergolong cukup baik, tetapi hasil pelayanan belum selalu sesuai dengan harapan masyarakat. Dari sisi sikap dan tanggapan petugas, masyarakat merasa cukup terbantu, namun dari sisi proses dan hasil pelayanan masih terdapat beberapa kekurangan. Masyarakat Distrik Furwagi menyatakan bahwa pelayanan sudah baik dan petugas membantu, tetapi kepuasan belum maksimal karena jarak yang jauh dan harus menunggu waktu tertentu untuk memperoleh pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa petugas cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat, namun sistem pelayanan secara keseluruhan belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat.

Masyarakat Furwagi lainnya menyampaikan bahwa pelayanan sudah baik, tetapi informasi mengenai jadwal pelayanan dan persyaratan administrasi sering tidak diketahui masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak siap atau bahkan terlewat memanfaatkan pelayanan yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi masih belum maksimal. Hal serupa juga terjadi di Distrik Pariwari. Masyarakat merasa terbantu oleh pelayanan yang diberikan, namun masih sering mengalami kendala karena kurangnya informasi mengenai berkas yang harus disiapkan. Akibatnya, masyarakat harus kembali lagi untuk melengkapi persyaratan sehingga pelayanan menjadi kurang praktis.

Dari sisi kecepatan pelayanan, masyarakat Furwagi menilai proses pelayanan belum dapat dikatakan cepat karena harus menunggu lama setelah pendataan dan hasil pelayanan tidak langsung selesai di tempat. Sementara itu, masyarakat Pariwari menilai pelayanan cukup cepat apabila seluruh persyaratan telah lengkap, tetapi akan lebih lama apabila terdapat kekurangan berkas. Hal ini

menunjukkan bahwa kecepatan pelayanan masih dipengaruhi oleh kelengkapan administrasi dan keterbatasan teknis di lapangan. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa petugas telah berupaya merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Namun, karena keterbatasan pelayanan di lapangan, tidak semua proses dapat diselesaikan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa kendala responsivitas tidak hanya berasal dari sikap petugas, tetapi juga dari keterbatasan sistem dan sarana pelayanan.

Petugas pelaksana juga menyatakan bahwa mereka berusaha merespons pertanyaan dan keluhan masyarakat secepat mungkin dengan memberikan penjelasan dan bantuan secara langsung. Akan tetapi, tidak semua pelayanan dapat langsung selesai karena masih memerlukan proses lanjutan di kantor. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di Distrik Pariwari dan Distrik Furwagi dapat dikatakan cukup responsif, namun belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya upaya petugas membantu masyarakat, tetapi masih terdapat keluhan mengenai kecepatan pelayanan dan kurangnya informasi yang jelas. Faktor-faktor yang memengaruhi responsivitas pelayanan meliputi:

1. Keterbatasan Penyampaian Informasi
   Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur, persyaratan, dan alur pengurusan akta kelahiran. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi yang belum maksimal dan belum dilakukan secara berkelanjutan sehingga masyarakat sering mengalami kebingungan dan harus bolak-balik dalam proses pengurusan.
2. Kecepatan Pelayanan yang Belum Konsisten
   Dalam beberapa kasus, pelayanan masih dirasakan lambat, terutama ketika jumlah pemohon meningkat atau terjadi kendala teknis. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung pelayanan.
3. Keterbatasan Jangkauan Pelayanan terhadap Keluhan Masyarakat
   Tidak semua keluhan masyarakat dapat ditangani secara langsung, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan. Akibatnya, sebagian masyarakat merasa belum mendapatkan respons yang cepat terhadap permasalahan yang mereka hadapi.
4. Rendahnya Pemahaman Masyarakat
   Responsivitas juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran dan prosedur pelayanan. Kondisi ini menyebabkan komunikasi antara masyarakat dan petugas menjadi kurang efektif sehingga proses pelayanan menjadi lebih lama dan kurang efisien.

Berdasarkan dimensi responsivitas William N. Dunn, pelayanan pencatatan akta kelahiran di Distrik Pariwari dan Distrik Furwagi cukup responsif, tetapi belum optimal. Petugas telah menunjukkan sikap membantu, memberikan penjelasan, dan menanggapi keluhan masyarakat dengan cukup baik. Namun, responsivitas masih perlu ditingkatkan terutama dalam kejelasan informasi, kepastian prosedur, jangkauan pelayanan, dan kecepatan penyelesaian pelayanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di Distrik Pariwari dan Distrik Furwagi Kabupaten Fakfak telah berjalan melalui pelayanan di kantor maupun program jemput bola, namun belum mencapai hasil yang optimal. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa program jemput bola mampu meningkatkan kepemilikan akta kelahiran dan memperluas jangkauan pelayanan, bahkan Distrik Furwagi yang merupakan wilayah perkampungan memiliki capaian kepemilikan akta kelahiran lebih tinggi dibandingkan Distrik Pariwari. Namun demikian, target kepemilikan akta kelahiran secara keseluruhan masih belum tercapai karena rendahnya kesadaran

masyarakat, keterbatasan akses pelayanan, serta kondisi geografis yang memengaruhi pelaksanaan pelayanan di lapangan. Sama halnya dengan temuan penelitian Amalia (2020) yang menyatakan bahwa inovasi pelayanan akta kelahiran telah berjalan sesuai prosedur tetapi masih menghadapi hambatan sarana prasarana dan rendahnya kesadaran masyarakat. Temuan ini juga memperkuat penelitian Lidya Euanjelia Wambrauw (2025) yang menemukan bahwa program jemput bola menjadi strategi penting untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena adanya kendala geografis dan keterbatasan fasilitas pelayanan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan pencatatan akta kelahiran tidak hanya berasal dari masyarakat, tetapi juga dari aspek penyelenggara pelayanan, seperti keterbatasan anggaran operasional, sarana prasarana, fasilitas pelayanan lapangan, dan keterbatasan sumber daya manusia. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan belum merata dan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Piet Hein Pusung (2024) yang menyimpulkan bahwa pemenuhan hak kependudukan belum optimal karena masih terdapat berbagai hambatan dalam implementasinya. Namun, berbeda dengan temuan Isma Nirmala (2022) yang menunjukkan bahwa inovasi pelayanan akta kelahiran secara daring mampu memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Pada penelitian ini, kendala akses wilayah dan keterbatasan infrastruktur menjadi faktor dominan sehingga pelayanan digital belum dapat sepenuhnya menjadi solusi utama bagi masyarakat di Kabupaten Fakfak. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan sosialisasi, penguatan program jemput bola, dukungan anggaran, serta penyesuaian strategi pelayanan berdasarkan karakteristik wilayah agar kualitas pelayanan pencatatan akta kelahiran dapat lebih efektif, efisien, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan menarik bahwa tingkat kepemilikan akta kelahiran di Distrik Furwagi yang merupakan wilayah perkampungan justru lebih tinggi dibandingkan Distrik Pariwari yang merupakan wilayah perkotaan. Temuan ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan pusat pelayanan tidak selalu menjadi faktor utama keberhasilan pencatatan akta kelahiran. Keberhasilan di Distrik Furwagi didukung oleh adanya program pelayanan jemput bola serta peran aktif aparat distrik dalam membantu masyarakat mengurus dokumen kependudukan. Sementara itu, faktor penghambat yang masih ditemukan meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, ketidaklengkapan persyaratan administrasi, keterbatasan anggaran dan sarana pelayanan, serta belum rutinnya pelaksanaan program jemput bola di seluruh wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan lebih dipengaruhi oleh pendekatan pelayanan yang aktif dan dukungan stakeholder setempat dibandingkan faktor akses geografis semata

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di Distrik Pariwari dan Distrik Furwagi Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat telah berjalan melalui pelayanan di kantor dan program jemput bola, namun belum optimal karena masih menghadapi kendala pada aspek efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan responsivitas. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pemahaman prosedur dan kelengkapan berkas, keterbatasan akses wilayah, anggaran, sarana pelayanan, serta belum optimalnya penyampaian informasi dan pelaksanaan program jemput bola. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, perluasan program jemput bola, penguatan dukungan

operasional, perbaikan sistem pelayanan, serta penyesuaian strategi pelayanan sesuai karakteristik wilayah agar pelayanan pencatatan akta kelahiran menjadi lebih efektif dan merata.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang hanya dilakukan di Distrik Pariwari dan Distrik Furwagi Kabupaten Fakfak sehingga belum dapat menggambarkan kondisi seluruh wilayah Kabupaten Fakfak. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan waktu penelitian yang terbatas sehingga hasilnya bergantung pada informasi dari informan yang diwawancarai.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penelitian selanjutnya disarankan dilakukan pada lebih banyak distrik atau wilayah lain di Papua Barat dengan menggunakan metode yang lebih beragam agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pencatatan akta kelahiran serta efektivitas program pelayanan administrasi kependudukan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, Pemerintah Distrik Pariwari dan Distrik Furwagi, serta seluruh informan dan pihak yang telah memberikan izin, bantuan, dukungan, dan data selama pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing dan semua pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik

VI. DAFTAR PUSTAKA

AbouZahr, C., de Savigny, D., Mikkelsen, L., Setel, P. W., Lozano, R., Nichols, E., Notzon, F., & Lopez, A. D. (2015). Civil registration and vital statistics: Progress in the data revolution for counting and accountability. The Lancet, 386(10001), 1373–1385. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60173-8

Amalia, F. R. (2020). Efektivitas Inovasi "One Day Service" Dalam Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6245415

Batubara, Y. E. (2022). Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Majalengka. Jurnal Konstituen. https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2921

Cobos Muñoz, D., Abouzahr, C., & de Savigny, D. (2018). The 'Ten CRVS Milestones' framework for understanding civil registration and vital statistics systems. BMJ Global Health, 3(2), e000673. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2017-000673

Isma Nirmala. (2022). Inovasi Pelayanan Online Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. 8. https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/KAGANGA/article/view/3573

Ismail, M., & Moersito, J. (2021). Sistem informasi administrasi kependudukan. Fakultas Perlindungan Masyarakat IPDN. https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=3696

Ismail, M. G. S. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Garut. Jurnal Registratie. https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2429

Lidya Euanjelia Wambrauw. (2025). Pelayanan Akta Kelahiran bagi Penduduk Suku Umari oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

Maulidiah, S. (2014). Pelayanan Publik (M. S. Dr. H. RahyunirRauf (ed.)). CV. Indra Prahasta.

Mikkelsen, L., Phillips, D. E., AbouZahr, C., Setel, P. W., de Savigny, D., Lozano, R., & Lopez, A. D. (2015). A global assessment of civil registration and vital statistics systems: Monitoring data quality and progress. The Lancet, 386(10001), 1395–1406. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60171-4

Musadad, D. A., Rao, C., Mikkelsen, L., Adair, T., & colleagues. (2023). Implementation research for developing Civil Registration and Vital Statistics systems in Indonesia: Lessons from pilot districts. BMJ Global Health, 8(7), e012358. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-012358

Phillips, D. E., AbouZahr, C., Lopez, A. D., Mikkelsen, L., de Savigny, D., Lozano, R., & Setel, P. W. (2015). Are well functioning civil registration and vital statistics systems associated with better health outcomes? The Lancet, 386(10001), 1386–1394. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60172-6

Piet Hein Pusung. (2024). Implementasi Pemenuhan Hak Kependudukan Bagi Suku Anak Dalam Di Kabupaten Batang Hari. Jurnal Mapalus Ilmu Administrasi Negara, 1(1), 1–12. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=rtNnQqcAAAAJ&citation_for_view=rtNnQqcAAAAJ:kNdYIx-mwKoC

Ripa'i, A. (2019). Administrasi kependudukan & pencatatan sipil: Buku literatur IPDN. Cendekia Press. https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=26144

Saputra, R., & Risnawati, A. (2022). Pelayanan administrasi kependudukan. Sketsa Media. https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=27976

Zulfikar; Rozaili; Hansyar. (2022). Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia. (M. P. Darmawan Edi Winoto, S.Pd. (ed.)). CV.EUREKA MEDIA AKSARA.